HAK MEMPEROLEH BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA
YACHA AULIA RUSDI LUBAKISAR
EMAIL: yachauliarusdi@gmail.com
NO BP : 1910003600538
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS EKA SAKTI (UNES) PADANG
SUMATERA BARAT INDONESIA

ABSTRAK

Latar belakang : Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum, sehingga jelas Indonesia disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Tujuan : untuk melaporkan hak memperoleh bantuan hukum di pengadilan tata usaha

Metode : ulasan ini berfokus pada hukum tata usaha dalam memperoleh bantuan hukum di pengadilan

Hasil : didapatkan bahwa hak memperoleh pengadilan tata usaha negara berperan penting dalam ruang lingkup pengadilan di Indonesia.

Kesimpulan : ulasan ini berkontribusi pada hak dalam memperoleh bantuan hukum pengadilan tata usaha negara

KATA KUNCI : hukum tata usaha, pengadilan dan bantuan

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum, sehingga jelas Indonesia disebut sebagai negara hukum. Sebagai negara hukum, berarti di negara kita hukumlah yang mempunyai arti penting terutama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat. Segala penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh negara dengan perantaraan pemerintahnya harus sesuai dan menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh hukum.

Sebagai salah satu contoh secara materil, Peraturan perundang-undangan yang telah diadakan lebih dahulu merupakan batas kekuasaan penyelenggaraan negara. Undang Undang Dasar yang memuat norma-norma hukum dan peraturan-peraturan hukum harus ditaati dengan tidak memandang bulu, baik oleh masyarakat, pemerintah sendiri maupun badan-badan penyelenggaranya. Hukum Tata usaha Negara bisa di artikan sebagai sebuah aturan atau hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di suatu negara. Hukum tersebut mengatur adanya tata pelaksanaan pemerintah dalam suatu masa dalam menjalankan kewajibannya dan juga tugasnya. Secara umum, hukum acara PTUN mengatur tentang perbuatan perseorangan, perseorangan, dan badan hukum yang mempertahankan haknya, serta cara mengajukan ke pengadilan tata usaha negara untuk memelihara dan menegakkan hukum tata usaha negara. pengadilan adalah alat utama untuk menyelesaikan perselisihan, dan biasanya dipahami karena setiap orang memiliki hak untuk menggunakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia, Hal ini telah diatur dalam Undang Undang Nomor 5

Tahun 1986 jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk memberikan pelayanan publik bagi semua kalangan, apalagi pengajuan gugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara terbilang lebih murah dari pada menyelesaikan dalam peradilan umum, yakni dengan membayar panjar biaya gugatan, dengan demikian, Peradilan Tata Usaha Negara itu diadakan dalam rangka memberikan perlindungan kepada rakyat pencari keadilan, yang merasa dirinya dirugikan akibat suatu keputusan tata usaha negara. Kemudian seiring dengan terus berkembangnya zaman, Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bermula termuat dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 ini, perlu diadakannya revisi kembali. Dari berbagai aspek permasalahan perihal UU Nomor 5 Tahun 1986 sampai pada Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, perlu kiranya kita pahami sehingga dapat membuka wawasan kita mengenai HTUN (Hukum Tata Usaha negara), baik menyangkut bagaimana sejarah adanya HTUN di Negara Indonesia, maupun muatan-muatan yang terkandung didalam perundang-undangan tersebut. Adapun hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara Perdata, dengan perbedaan dimana Peradilan Tata Usaha Negara. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna memperoleh kebenaran materiil dan tidak seperti dalam kasus gugatan perdata, gugatan TUN bukan berarti menunda dilaksanakannya suatu KTUN yang disengketakan.

B. PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Hukum Tata Usaha

Pengertian Hukum Tata usaha Negara bisa di artikan sebagai sebuah aturan atau hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di suatu negara. Hukum tersebut mengatur adanya tata pelaksanaan pemerintah dalam suatu masa dalam menjalankan kewajibannya dan juga tugasnya. Hukum tata usaha negara itu sendiri menitik beratkan kepada hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah. Untuk hukum tata usaha negara sendiri terkadang orang kebingungan untuk membedakannya dengan Hukum Tata Negara. Hukum tata negara sendiri lebih fokus kepada hal mengenai konstitusi atau hukum dasar yang di gunakan oleh suatu negara untuk mengatur suatu negara mengeluarkan kebijakan pemerintah.

Apa yang di maksud dengan keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang No 5 tahun 1986 terdapat dalam pasal 1 angka 3 yang menentukan bahwa keputusan Tata usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Jika di urai, apa yang di maksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan di temukan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Penetapan tersebut tertulis dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

- b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha negara
- c. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d. Bersifat konkret, individual atau final
- e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[3]

Bantuan hukum adalah segala bentuk bantuan hukum yang diberikan kepada seseorang yang tidak mampu secara finansial (baik berupa pemberian nasehat hukum maupun dalam bentuk agen seseorang) sehingga ia tidak dapat membayar pembela atau pengacara. Menurut pendapat Jaksa Agung Republik Indonesia, bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh terdakwa dari penasihat hukum pada saat pemeriksaan pendahuluan atau dalam persidangan perkara di pengadilan.

2.2 Hukum Tata Usaha

Hukum Tata usaha negara adalah rangkaian peraturan, norma, dan prinsip hukum yang mengatur penyelenggaraan hukum tata usaha negaral. dalam hukum Indonesia, kekuasaan hukum tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha nasional di lingkungan Mahkamah Agung. Hukum Acara PTUN. Secara umum, hukum acara PTUN mengatur tentang perbuatan perseorangan, perseorangan, dan badan hukum yang mempertahankan haknya, serta cara mengajukan ke pengadilan tata usaha negara untuk memelihara dan menegakkan hukum tata usaha negara.

memberikan pengertian peradilan tata Usaha & negara dalam arti luas dan dalam arti sempit dalam arti luas peradilan yang menyangkut pejabat - pejabat dan instansi instansi administra& negbaik yang bersifat perkara pidana, dan perkara perdata

2.3 Pengadilan

Pengadilan adalah forum resmi publik di mana otoritas hukum membentuk kewenangan publik untuk menyelesaikan perselisihan dan mencari keadilan di bidang perdata, ketenagakerjaan, administrasi, dan pidana sesuai dengan hukum, pengadilan adalah alat utama untuk menyelesaikan perselisihan, dan biasanya dipahami karena setiap orang memiliki hak untuk menggunakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai sub sistem dari sistem peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan pengadilan. Demikian juga tergugat berhak mencari perlindungan di pengadilan. Mengenai eksistensi lembaga peradilan tata usaha negara, mau tidak mau kita harus melihat ke negara Perancis, suatu negara yang memuat fakta sejarahnya merupakan pelopor kelahiran lembaga sejenis ini untuk pertama kali. Peranan negara ini terasa sampai sekarang. Antara lain negara ini berperan sebagai pemuka dalam "association internationale of supreme administrative jurisdictions". Sejarah kelahiran lembaga peradilan administrasi di Prancis ini dimulai sekitar tahun 1790, dengan undang-undang tanggal 16 dan 24

agustus 1790, yang memberi fungsi kepada conseil d'etat untuk bertindak sebagai lembaga pengawasan (judiciil controle) terhadap administrasi/pemerintah dan lembaga peradilan untuk dilepaskan wewenangnyanya untuk memeriksa dan mengadili sengketa administrasi, dan saat itulah dapat dikatakan sebagai awal mulanya penafsiran dari prinsip yang mengakibatkan lahirnya sistem Prancis tentang kontrol administrasi yang dilakukan suatu peradilan administrasi yang bebas dan terpisah.

Pada mulanya pula lembaga conseil d'etat merupakan satu-satunya lembaga peradilan administrasi dalam arti umum untuk seluruh Prancis, yang berarti bahwasannya semua sengketa administratif diadili oleh conseil d'etat kecuali sengketa-sengketa secara tegas diserahkan penyelesaiannya kepada badan-badan peradilan administrasi khusus lainnya. Akibatnya, beban lembaga conseil d'etat tiap hari kian banyak, sehingga pada tahun 1953 saja jumlah Perkara yang diajukan kepada lembaga ini mencapai 26.000 perkara, yang mengakibatkan hal-hal tersebut justru sangat merugikan kepada semua pihak, sehingga perlu jalan keluar untuk mengatasinya. Sebagai jalan keluarnya pada tahun 1953 dibentuklah apa yang kita kenal sekarang sebagai "tribunal administratif", yang kedudukan di daerah tersebut dan merupakan lembaga peradilan administrasi dalam tingkat pertama.

Selanjutnya mengenai peradilan tata usaha negara di Indonesia awal mulanya dan merupakan tonggak sejarah berdirinya peradilan tata usaha negara yakni dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Kemudian dilakukannya perubahan dengan adanya undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Selanjutnya

dilakukan Perubahan lagi dengan adanya undang-undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara.

Mengenai konsep rancangan undang-undang hukum acara peradilan tata usaha negara sebenarnya sudah lama dibicarakan bahkan pada tahun 1948 susah dibicarakan tentang konsep rancangan hukum acara ini. Pada waktu itu. "rencana undang-undang ini disusun oleh prof. Dr, Eirjono projodikoro, SH., kira-kira pada tahun 1948 atas perintah menteri kehakiman Drs. Susanto tirtoprodjo, SH di Yogyakarta sebelum ada penyerahan kedaulatan oleh Belanda pada penghabisan tahun 1949. Pernah juga disusun rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dan dimatangkan oleh lembaga pembinaan hukum nasional/ LPHN (sekarang badan pembinaan hukum nasional/ BHPN) pada tanggal 10 januari 1966, dan dipublikasikan dalam penerbitan 1 LPHN 1967. Tetapi rancangan undang-undang tersebut belum sempat dimajukan oleh pemerintah kepada DPR GR, oleh DPR pernah diusahakan sebagai unsul inisiatif oleh DPR GR tahun 1967. Tetapi rancangan ini gagal tidak dapat menyelesaikan.

Ditempat yang sama pernah juga dilaksanakan simposium dimana dalam simposium tersebut membahas konsep naskah rancangan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara juga pernah dibahas dalam simposium tentang peradilan tata usaha negara yang diselenggarakan oleh badan pembinaan hukum nasional di jakarta tanggal 5-7 februari 1976.

Keinginan untuk segera membentuk peradilan tata usaha negara ini dipertegas lagi dalam pidato kenegaraan presiden republik indonesia, soeharto, dihadapan sidang pleno DPR pada tanggal 16 agustus 1978 yang

isinya tentang mekanisme untuk meratakan keadilan, yaitu:

1. Penyelesaian perkara seadil-adilnya dan secepat-cepatnya
2. Bantuan hukum untuk mereka yang kurang mampu
3. Segera akan dibentuknya peradilan tata usaha negara[9]

Lebih lanjut presiden republik indonesia (Bapak Soeharto) mengirim surat kepada pemimpin dewan perwakilan rakyat republik indonesia di Jakarta dengan nomor: R.07/ PU / V / 1982, tanggal 13 mei 1982 perihal rancangan undang-undang tentang peradilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dimana isi surat tersebut pada pokoknya “untuk mohon dibicarakan dalam sidang dewan perwakilan rakyat guna mendapatkan persetujuan pada sidang 1981-1982. Selanjutnya untuk keperluan pembicaraan dalam persidangan mengenai rancangan undang-undang tersebut, kami persilahkan saudara menghubungi saudara menteri kehakiman” dan dalam surat tersebut tembusanya disampaikan kepada wakil presiden, ketua mahkamah agung dan menteri kehakiman¹³. Selanjutnya pada tahun 1986 pemerintah mengajukan rancangan undang-undang tersebut kepada DPR dan pada waktu itu DPR menyetujui.

Pada tanggal 29 Desember 1986 disahkan undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara lembaran negara republik indonesia tahun 1986 nomor 7 dan di undangkan di Jakarta pada tanggal 29 desember 1986 oleh menteri sekretaris negara republik indonesia.

Dengan disahkannya undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, maka ada angin segar tentang pembekuan peradilan tata usaha negara di Indonesia waktu itu. Sejak mulai efektif diopersikan undang-undang tersebut pada tanggal 14 januari 1991

berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, yang sebelumnya ditandai dengan diresmikan tiga pengadilan tinggi tata usaha negara (PTTUN) di Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang. Serta lima pengadilan tata usaha negara (PTUN) di Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya, dan Ujung Pandang maka sejak itu terbentuklah pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Kemudian seiring dengan perkembangan dan kebutuhan maka semakin banyak pula dibentuk pengadilan di kota-kota lainya (Seperti di pengadilan tata usaha negara (PTUN) di seluruh ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat pertama, dan juga banyak pula dibentuk pengadilan tinggi tata usaha). Sedangkan mengenai susunan pengadilan tata usaha negara terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Pimpinan pengadilan terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua. Sedangkan hakim anggota pada pengadilan tinggi tata usaha negara adalah hakim tinggi.

Obyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara Yang menjadi obyek dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Kekuasaan kehakimandilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam UU PTTUN dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pada dasarnya merupakan pengadilan tingkat banding terhadap sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali dalam sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya serta sengketa yang terhadapnya telah digunakan upaya administratif.

C. Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Pengertian Hukum Tata usaha Negara bisa di artikan sebagai sebuah aturan atau hukum yang mengatur mengenai jalannya administrasi di suatu negara. Hukum tersebut mengatur adanya tata pelaksanaan pemerintah dalam suatu masa dalam menjalankan kewajibannya dan juga tugasnya. Hukum tata usaha negara itu sendiri menitik beratkan kepada hal-hal yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sebuah pemerintah.
2. Tujuan peradilan Tata Usaha Negara adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.
3. Sejarah mengenai adanya HTUN di Indonesia berkiblat pada Prancis, yang kemudisn diatur oleh UU Nomor 5 Tahun 1986 dan direvisi sebanyak dua kali.
4. Dalam penyesuaiannya, UU Nomer 5 Tahun 1986, terdapat beberapa perubahan dengan UU N OMOR 9 Tahun 2004 dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Perubahan pada pasal 2, pasal 4, pasal 6, pasal 7, pasal 12 – 22, pasal 26, pasal 28- 38, pasal 42, pasal 44 – 46, pasal 53, pasal 116.
 - b. penambahan pasal 9A sampai dengan pasal 39E, pasal 143A.
 - c. Penghapusan pasal 118
 - d. penggantian pada penjelasan Umum yang menyebut “Pemerintah” menjadi “Ketua Mahkamah Agung”
5. muatan perubahan kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 ini, penulis

Menitik beratkan pada kekuasaan kehakiman, UUD 45 telah mengatur secara jelas bahwasannya kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

6. Kopetensi Peradilan disebut dalam dua pembagian oleh pakar hukum yaitu relatif dan absolut.

Daftar Pustaka

Franciska Romana H. & Sunarya R 2014. Jurnal, Mimbar Hukum Vol. 26, Nomor 2

Soetami, Siti. 2001. Hukum Peradilan Tata Usaha Negara. Bandung: Refika Aditma.

SF Mrbun. 2003. Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: LIBERTY.

R. Wiyono. 2008. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Grafika.

Tjandra, W. Riawan. 1999. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Situmorang, Victor. 1992. Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Rineka Cipta.

Yanto, Nur. 2015. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Mitra Wacana.

Wantu, Force M. 2014. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Gorontalo: UNG Press.

Wijaya, Adhy. sAnalisis Perbandingan Perubahan Antara UU No. 5 Tahun 1986,

UU No. 9 Tahun 2009, dan UU No. 51 Tahun 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-IX/2011, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 1, Maret 2016 : 136 – 137

Qamar, Nurul. 2011. Karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Makassar: Pustaka Refleksi.

Tim Permata Press, Undang-Undang Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bernat Panjaitan, Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (TUN) Pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Jurnal Ilmiah "Advokasi". Vol.03.No.02, September 2015.